

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi empiris pada Kabupaten Jember)

Factors Affecting the Performance Accountability Government (empirical study on Kabupaten Jember)

Erwin Agus Triuriana
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Trianaerwina@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metoda survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan unit kerja atau seluruh pejabat di Kabupaten Jember. sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Pemerintah kabupaten Jember yang memegang jabatan sebagai kepala dinas, sekretaris dinas kepala bagian, kepala sub bagian, kepala seksi dengan jumlah sampel 45. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas. Pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji parsial (t-test) dan uji simultan (f-test). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kata Kunci: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan.

Abstract

This study aimed to examine the effect of budget goal clarity, control accounting, performance accountability reporting system to government agencies. Methods This study uses a survey method by distributing questionnaires to the respondents. Samples was determined by using purposive sampling technique. The population in this study were all around the unit leader or official in Jember. samples in this study are the Jember district government employees who held positions as head of department, head of the department secretary, head of the sub-section, head section with a sample of 45. data in this study is primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data analysis method used is multiple linear regression. The test used is the quality of test validity and reliability test. The classical assumption used is the normality test, heterocedasticity, multicollinearity, testing the hypothesis using the coefficient of determination, partial test (t-test) and a simultaneous test (f-test). Based on these results, it can be concluded that the budget goal clarity, control accounting, reporting a significant effect on system performance accountability of government agencies with help of SPSS (Statistical Product and Service Solution).

Keywords: Performance accountability of public institution, Budget goal clarity, Accounting control, Reporting system

Pendahuluan

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang

relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Halim (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat,

yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Kusumaningrum (2010), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Kenis (1979) dalam Darma (2004) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Anggaran merupakan elemen kunci (*key element*) dalam sistem perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsi dari agen pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas (Bastian, 2006). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan evaluasi anggaran.

Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003).

Untuk menjamin anggaran dengan baik perlu dilakukan pengendalian. Agar kinerja yang diharapkan dapat meningkat setelah adanya desentralisasi, pengambilan

keputusan operasi harus mengadopsi pengendalian akuntansi dan pengendalian-pengendalian yang diperlukan.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Apriadi (2010) dan kusumaningrum (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam kerangka mewujudkan (*Good Governance*), perlu adanya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus terus dilakukan. Menghadapi era keterbukaan dan globalisasi diharapkan agar aparatur pemerintah mampu memberikan pelayanan dengan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga meningkatkan pemberian pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Metode Penelitian

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan unit kerja atau seluruh pejabat di Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (pemilihan sampel secara tidak acak) sehingga sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Pemkab Jember yang memegang jabatan sebagai kepala dinas, sekretaris dinas kepala bagian, kepala sub bagian, kepala seksi di Kabupaten Jember dan telah menjabat pada bagian tersebut minimal selama 1 tahun.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *survey*, yaitu dengan menyebarkan kuesioner.

Variabel penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan

variabel independennya adalah akuntansi pertanggungjawaban (X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependennya adalah prestasi kerja (Y).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2002:181). Uji validitas dilakukan terhadap kuisioner dengan mengkolerasikan skor item dengan skor seluruh total item. Data penelitian menggunakan *scala Likert*. Suatu pernyataan dikatakan valid jika koefisiensi korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari nilai kritis (r_{tabel}) maka dikatakan valid. Selain itu jika nilai *level of significance* lebih kecil dari 0,05 (5%) dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung *Chronbach Alpha* dalam program SPSS (*Statistic Package for Social Science*). Secara umum instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas model bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normal *probabilty plot of standardized residual*. Maka akan menunjukkan titik-titik penyebaran sampel dalam bentuk grafik. Menurut Ghozali (2006:76 dalam Rahmadianto, 2012) alasan pengambilan sampel dari uji normalitas adalah

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pedoman suatu model regresi yang bebas problem multikolinearitas adalah jika mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 persen dan nilai tolerance lebih dari 10 persen (Ghozali, 2006:91)

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dan dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dilakukan metode *scater plot* (Ghozali, 2006:105). Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh satu arah variabel terhadap variabel lain. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- a : Konstanta
- X_{1-3} : Koefisien Regresi Variabel X_1, X_2, X_3
- X_1 : Kejelasan anggaran
- X_2 : Pengendalian Akuntansi
- X_3 : Sistem Pelaporan
- e : Kesalahan Regresi

Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. Uji F dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang sehingga nilai koefisien regresi secara bersama-sama dapat diketahui. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas)

- Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak berhasil ditolak, yang berarti bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.
- Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 berhasil ditolak, yang berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Apabila hanya terdapat satu variabel independen maka R^2 yang dipakai tetapi apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka digunakan *Adjusted R²*. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel, dengan ketentuan interval kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengambilan keputusan uji t yang dilakukan ditentukan sebagai berikut: Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, demikian pula sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak..

Hasil Penelitian

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian yang dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas kinerja. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah 45 kuesioner.

Tabel 1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Rincian	Jumlah
Total kuesioner yang dibagikan	60
Total kuesioner yang kembali	54
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	9
Tingkat kuesioner yang dapat diolah	75%

Deskripsi variabel penelitian digunakan sebagai informasi awal dalam menganalisis hasil jawaban responden. Pada bagian ini akan disajikan statistik deskriptif dari variabel independen maupun variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi pertanggungjawaban dan prestasi kerja. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kejelasan sasaran anggaran	3	5	3,985	0,581
Pengendalian akuntansi	3	5	3,922	0,506
Sistem pelaporan	2	5	4,061	0,533
Akuntabilitas kinerja	3	4	4,211	0,404

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), pengendalian

akuntansi (X_2), sistem pelaporan (X_3) terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Pengolahan data dengan menggunakan bantuan paket statistik SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Analisis Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	t_{tabel}	Sign
Konstanta	1,404	3,887	2,020	0,000
Kejelasan sasaran anggaran	0,229	2,079	2,020	0,044
Pengendalian akuntansi	0,295	2,273	2,020	0,028
Sistem pelaporan	0,177	2,204	2,020	0,033
R. Square = 0,620				
Adjusted R. Square = 0,592		Signifikansi = 0,000		

Model persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$\hat{Y} = 1,404 + 0,229X_1 + 0,295X_2 + 0,177X_3 + e$$

Sesuai dengan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta = 1,404. Nilai konstanta menunjukkan nilai positif sebesar 1,404. Hal ini berarti bahwa, apabila nilai dari variabel X_1 , X_2 , X_3 dan e nilainya konstan (nol), maka nilai variabel Y (Akuntabilitas Kerja Intansi Pemerintah) sebesar 1,404 point.
2. Nilai koefisien $b_1 = 0,229$, berarti bahwa apabila nilai variabel X_1 mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 point.
3. Nilai koefisien $b_2 = 0,295$, berarti bahwa apabila nilai variabel X_2 mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,295 point.
4. Nilai koefisien $b_3 = 0,177$, berarti bahwa apabila nilai variabel X_3 mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,177 point.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model yang harus dilakukan dalam regresi linear. Ketentuan yang digunakan :

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak berhasil ditolak dan H_a ditolak, jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 berhasil ditolak dan H_a diterima

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,788	0,620	0,592	0,25796

Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan nilai statistic t_{tabel} dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan yaitu 5%. Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau apabila probabilitas $< \alpha$ (α).

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel kejelasan sasaran anggaran lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,079 > 2,020$ dan tingkat probabilitasnya $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel Pengendalian Akuntansi lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,273 > 2,020$ dan tingkat probabilitasnya $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel Sistem Pelaporan lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,204 > 2,020$ dan tingkat probabilitasnya $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan variabel Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah dengan koefisien 0,229. Hal ini berarti dengan semakin baiknya kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan

secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja yang semakin baik, keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintah akan meningkatkan adanya kinerja yang baik, hal ini sesuai dengan penelitian dari Abdullah (2005) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peningkatan kinerja akan menyebabkan akuntabilitas dapat tercapai dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pengendalian akuntansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah dengan koefisien 0,295. Hal ini berarti dengan semakin baiknya pengendalian akuntansi anggaran maka akuntabilitas kerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Pengendalian akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena dapat memperkecil angka kesalahan pada setiap perhitungan yang dilakukan. Adanya pengendalian akuntansi maka akan dapat diketahui beberapa rincian dalam melakukan suatu perhitungan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan dalam suatu instansi pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Miah dan Mia (1996) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa pilihan struktur organisasi memiliki implikasi signifikan dengan sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin besar kebutuhan institusi induk terhadap pengendalian akuntansi untuk mengontrol dan mengevaluasi aktivitas dan tanggungjawab yang didelegasi. Jadi, adanya pengendalian akuntansi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada suatu instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel Sistem Pelaporan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah dengan koefisien 0,177. Hal ini berarti dengan semakin baiknya Sistem Pelaporan anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Saprudin (2001) dalam Kusumaningrum 2010 menjelaskan bahwa sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Adanya sistem pengelolaan

keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2010), dan Abdullah (2005). Jadi, adanya sistem pelaporan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada suatu instansi pemerintah.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula kualitas kinerja. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Abdullah (2005) dalam Rahmadianto (2012) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Abdullah (2005) dan Kusumaningrum (2010) pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Saprudin (2001) dalam Kusumaningrum 2010 dan Herawaty (2011) sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka dibutuhkan kejujuran responden dalam menjawab poin-poin pertanyaan kuesioner tersebut. Apabila kemungkinan ada responden yang tidak menjawab dengan serius atau dengan tidak jujur atau karena faktor-faktor kesibukan dalam pekerjaan, maka hal tersebut diluar kontrol peneliti. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan wawancara atau menggunakan kuesioner terbuka. Dengan demikian jawaban responden dapat lebih lengkap dan jelas.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2005. *Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kantor BPK Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Apriadi, Aap. 2010. "Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten". Klaten. Artikel Penelitian.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Darma, E. S. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Herawaty, Netty. (2011) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2011. Hal 31-36.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kenis, I., Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review* (Oktober 1979).
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro: Jawa Tengah.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Miah, N.Z dan L. Mia (1996), "Decentralization, accounting controls and performance of government organization: a New Zealand empirical study", *Financial, Accountability and Management*, Vol 12 No.3, pp.173-190.
- Rahmadianto, Dicky. 2012. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pasuruan)* tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Saprudin, (2001). *Pengaruh Kejelasan Anggaran dan Pelaporan terhadap Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pengendalian Manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Indonesia*, Tesis S2 UGM, Yogyakarta.